

**RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS  
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2014  
YOGYAKARTA, TANGGAL 14-16 OKTOBER 2014**

Dari hasil diskusi atas materi yang disampaikan pada sidang pleno Sesi I dan Sesi II, maka Tim Perumus dengan memperhatikan substansi, isu strategis dan permasalahan yang disampaikan oleh peserta rakornis dan para narasumber dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi darat, perlu direncanakan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang komprehensif, sistemik dan berkelanjutan dengan mempedomani Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJPN), Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan di lingkungan Departemen Perhubungan dan PM 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perhubungan;
2. Sinergi dan harmonisasi rencana pengembangan infrastruktur perhubungan darat perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan kewenangan, optimalisasi anggaran dan kemampuan daerah, serta pengalokasian anggaran subsidi angkutan umum.
3. Dalam rangka meningkatkan azas manfaat hasil pembangunan infrastruktur transportasi darat, perlu dilakukan langkah optimalisasi dan sinergi antara pusat dan daerah terkait dengan pengalihan status aset (hibah);
4. Dalam kaitannya dengan pembangunan melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penetapan daerah yang mendapatkan alokasi DAK perlu dipertimbangkan kembali bukan berdasarkan pemerataan daerah tetapi perlu dipertimbangkan juga potensi daerah yang bersangkutan;
5. Dalam rangka optimalisasi/pembatasan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT), maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasi

dampak/multiplier effect yang akan ditimbulkan, antara lain : regulasi terkait pengendalian BBM Kuota oleh Pemda, diversifikasi energi, optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dan keberpihakan pemerintah dalam rangka pemberian subsidi BBM khususnya dalam penyelenggaraan angkutan umum (operator);

6. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat yang berkompeten baik ditingkat pusat maupun daerah mutlak harus segera dipenuhi untuk menghadapi kompleksitas permasalahan dan besarnya tantangan kedepan dalam upaya pengembangan sub sektor transportasi darat yang dilaksanakan melalui jalur pembibitan dan jalur pelatihan teknis yang berkualitas;
7. Sumber Daya Manusia (SDM) perhubungan darat yang ada saat ini harus diberdayakan secara efektif di lingkungan pemerintah daerah di masa otonomi daerah dan terus dilakukan peningkatan kapasitasnya sebagai salah satu upaya untuk menangani permasalahan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika masyarakat;
8. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang terpadu dan terarah, perlu segera dilakukan tindak lanjut berupa :
  - (1) penyelesaian penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nasional,
  - (2) perbaikan system dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor termasuk penyelenggaraan pengujian berkala oleh swasta antara lain :
    - a. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM);
    - b. Pengembangan Data Base;
    - c. Optimalisasi Penyelenggaran Kalibrasi;
    - d. Penerapan Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

- (3) Membangun dan mengembangkan system penyelenggaraan angkutan jalan serta mempercepat penyelesaian regulasi (al: percepatan penyelesaian RPP Angkutan)
9. Penanganan pengawasan angkutan barang sebagai salah satu rencana aksi yang ada dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) perlu segera dilakukan evaluasi dan reformulasi kebijakan.
  10. Kebijakan pengembangan transportasi perkotaan dilaksanakan dengan 5 pilar yang dilakukan secara bersamaan antara lain: Peningkatan Peran Angkutan Umum, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Penurunan Polusi Udara dan Suara, *Transportation Demand Management (TDM)* dan Pengembangan *Non Motorized Transport (NMT)*.
  11. Untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang lebih optimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, secara bertahap dan berkelanjutan Pemerintah Pusat memberikan bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada daerah sebagai stimulan (rangsangan) untuk mewujudkan kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan;
  12. Dalam rangka peningkatan kinerja angkutan sungai dan danau perlu keberpihakan pemerintah pusat, propinsi dan Kab/Kota untuk merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau termasuk SBNP di Sungai serta pelaksanaan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.
  13. Dalam rangka peningkatan kinerja angkutan penyeberangan perlu dilakukan rehabilitasi serta pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan dengan komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dan/atau badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana angkutan Penyeberangan dalam bentuk partisipasi pembangunan, termasuk pembebasan lahan, penyediaan jalan akses pelabuhan, serta anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaannya;

14. Dalam pembenahan sistem penyelenggaraan ASDP diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk integrasi pelayanan, meliputi dukungan fasilitas integrasi jaringan dan fisik layanan angkutan dari dan ke pelabuhan penyeberangan, penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis, dan penyempurnaan regulasi khusus ASDP;
15. Keselamatan yang merupakan isu global telah ditindaklanjuti dengan perwujudan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang secara berkesinambungan diimplementasikan rencana aksi oleh masing-masing Kementerian/Lembaga terkait secara sinergis;
16. Perwujudan bidang keselamatan merupakan suatu kesisteman perlu ditangani secara sinergis dan koordinatif sudah ditampung dalam RPJMN dan juga didukung melalui pendanaan DAK yang harus ditindaklanjuti dalam aktualisasi rencana aksi yang dituangkan dalam RPJMD.
17. System Manajemen Keselamatan (SMK) bagi perusahaan angkutan umum sebagaimana telah diamanahkan dalam UU No. 22/2009 dan tertuang dalam RUNK (Pilar 1) segera diimplementasikan dalam rangka untuk memperbaiki kinerja keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum.

Demikian kami sampaikan rumusan hasil Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2014, untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan dalam penetapan kebijakan serta pelaksanaan tugas-tugas baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, maupun Dinas Perhubungan/LLAJ di wilayah masing-masing.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

RAPAT KOORDINASI TEKNIS  
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN 2014  
KETUA BIDANG MATERI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Siagian', with a long horizontal line extending to the right.

Ir. JOHNNY SIAGIAN, MM